



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 24 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Hasil Pra Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 oleh Tim Pra Evaluasi SAKIP dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, perlu mereviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018 dengan menyempurnakan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyempurnaan Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
23. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
24. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2010;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2001 tentang Larangan Atas Minuman Beralkohol dalam Wilayah Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 17 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2004 tentang Larangan Terhadap Pelacuran (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2001 Nomor 6 Seri E);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2006 Nomor 19 Seri E);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 9 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 10 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Budidaya dan Kemitraan Usaha Tani Tembakau (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 7 Seri E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pamekasan 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEMPURNAAN INDIKATOR KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2013-2018.**

Pasal 1

Indikator Kinerja Pemerintah Kabupaten Pamekasan pada Bab VIII halaman 6-23 Tabel VIII.2 Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018 disempurnakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Juli 2015


BUPATI PAMEKASAN,



ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 28 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,**



ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 24

			c. SMA/SMK/MA	76	78	80	82	84	86		
			5 Prosentase guru yang bersertifikasi								
			a. SD/MI	64	67	70	73	76	79		
			b. SMP/MTs	80	82	85	88	90	93		
			c. SMA/SMK/MA	76	78	80	82	84	86		
			1 Jumlah pengunjung Perpustakaan	5.200 Org anggota	5.350 Org anggota	5.600 Org anggota	5.900 Org anggota	6.000 Org anggota	6.150 Org anggota	1 Peningkatan Budaya Baca	Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip
			2 Jumlah/judul buku yang dipinjam	270 / hari pengunjung	290 / hari pengunjung	300 / hari pengunjung	340 / hari pengunjung	360 / hari pengunjung	380 / hari pengunjung	dan Pengembangan	
			3 Jumlah/judul buku yang dikoleksi	8.000 judul buku	8.200 judul buku	8.350 judul buku	8.500 judul buku	8.750 judul buku	8.900 judul buku	Layanan Perpustakaan	
			4 Jumlah Mobil Perpustakaan Keliling	1 buah	1 buah	1 buah	2 buah	2 buah	3 buah		

		terhadap penduduk.									
		a. Perawat	991	991	991	991	991	991	991		
		b. Bidan	840	840	840	840	840	840	840		
		c. Kesehatan Masyarakat & Sanitarian	336	336	336	336	336	336	336		
		d. Kefarmasian	84	84	84	84	84	84	84		
		e. Gizi	185	185	185	185	185	185	185		
		3 Rasio kecukupan nakes pada masing masing sarana pelayanan kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		4 jumlah Kesesuaian kompetensi dan kewenangan tenaga kesehatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	2 Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat	1 Cakupan desa siaga aktif (%)	95%	90%	80%	84%	88%	92%	1 Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Dinkes	
		2 Rasio posyandu dan Polindes terhadap (penduduk)	1.105 / 189	1.120 / 189	1.134 / 189	1.148 / 189	1.161 / 189	1.174 / 189			
		3 Cakupan PHBS di semua tatanan	65%	67%	70%	73%	75%	75%			
		4 Prosentase penduduk yang menggunakan jamban.	72%	75%	75%	76%	78%	80%	2 Lingkungan Sehat	Dinkes	
		5 Prosentase rumah bersanitasi.	50%	75%	75%	78%	79%	80%			
		6 Prosentase rumah tangga pengguna air bersih.	64.50%	67%	67%	68%	69%	70%			
	3 Meningkatnya Layanan RSUD	1 Prosentase penduduk yang memanfaatkan RSUD	12%	13%	13%	14%	14%	15%	1 pengadaan,peningkata sarana rmh sakit/rmh sakit jiwa/rmh sakit mata/rmh sakit paru-paru	RSUD	
		2 Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	88,088	96,896	103,797	108,394	113,757	120,861			
		3 Jumlah kunjungan Rawat Inap	19,468	19,503	21,556	25,912	29,503	31,353			
		4 BOR (Bed Occupancy Rate)	65 - 85%	65 - 85%	65 - 85%	65 - 85%	65 - 85%	65 - 85%			
		5 TOI (Turn Over Interval)	1 - 3 hari	1 - 3 hari	1 - 3 hari	1 - 3 hari	1 - 3 hari	1 - 3 hari			
		6 ALOS (Average Length of Stay)	1 - 6 hari	1 - 6 hari	1 - 6 hari	1 - 6 hari	1 - 6 hari	1 - 6 hari			
		7 NDR (Net Death Rate)	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5	<2,5			
		8 GDR (Gross Death Rate)	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5	≤4,5			
		9 CRR (Cost Recovery Rate)	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		10 Prosentase penduduk miskin yang terlayani oleh RSUD	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	4 Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Urusan Pemberdayan perempuan dan perlindungan Anak)	GEM (<i>Gender Empowerment Measurement</i>) :							1 peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	BPP & KB	
		1 Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan)	90,40%	94,86%	95,05%	95,20%	95,75%	96%			
		2 Keterwakilan kaum perempuan di DPRD (laki-laki dan perempuan)	5%	10%	15%	17%	18%	20%			
		3 Proporsi manager, staf administrasi, pekerja profesional dan teknisi di lingkungan pemerintahan dan swasta (laki-laki dan perempuan)	10:01	8:01	8:01	7:01	6:01	5:01			
		GDI (<i>Gender Development Indeks</i>) :									
		1 Proporsi penduduk (laki-laki dan perempuan)	90,40%	94,86%	95,05%	95,20%	95,75%	96%			
		2 Usia harapan hidup (laki-laki dan perempuan)	55 Th	52 Th	58 Th	60 Th	62 Th	63 Th			
		3 Angka Melek Huruf (laki-laki dan perempuan)	70%	75%	79%	82%	85%	90%			
		4 Rata-rata lama sekolah (laki-laki dan	12 Th	13 Th	14 Th	15 Th	16 Th	17 Th			

		perempuan)									
		1 Jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga.	80 Ks	79 Ks	50 Ks	30 Ks	25 Ks	20 Ks	20 Ks	2 program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	BPP & KB
		2 Jumlah anak dan perempuan korban tindak kekerasan yang memperoleh pelayanan advokasi (Jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak)	80 Ks	79 Ks	50 Ks	30 Ks	25 Ks	20 Ks	20 Ks		
	5	Permantapan KB dan KS (Urusan KB dan KS)								1 Program Keluarga Berencana	BPP & KB
		Tingkat Prevalensi peserta KB Aktif :									
		1 Jumlah peserta KB aktif (orang)	122,791	120,160	126,145	128,245	130,000	133,000	133,000		
		2 jumlah PUS (Pasangan Usia Subur)	176,178	176,193	178,045	179,200	180,435	190,000	190,000		
		3 Prosentase Perkawinan dibawah umur	16.68%	16.05%	15.91%	13.35%	11.60%	10%	10%		
		4 Rata-rata usia kawin pertama bagi perempuan	17	18	19	20	21	25	25		
		5 Total Fertility Rate	1.90%	2.10%	2.20%	2.40%	2,5%	2,6%	2,6%		
		6 Persentase Pencapaian peserta KB Baru	80	82	83	84	85	87	87		
		Persentase peserta KB Pria :									
		1 Jumlah akseptor KB aktif	122,791	120,160	126,145	128,341	129,224	130,000	130,000		
		2 Jumlah akseptor KB aktif laki-laki	463	388	396	407	465	500	500		
		3 Persentase PUS Unmet-need	6,23%	6,26%	6,86%	7,45%	9,02%	10,00%	10,00%		
		1 Jumlah Keluarga Pra sejahtera menjadi sejahtera	1,35%	1,33%	1,45%	2,56%	3,04%	5,00%	5,00%	1 Program Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	BPP & KB
		2 Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga melalui rekrutmen tenaga kelompok bina keluarga	100	120	130	140	150	160	160	2 Program Promosi kesehatan ibu bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	BPP & KB
		3 Jumlah pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan ibu,bayi dan anak	5 kali	6 kali	6 kali	7 kali	9 kali	10 kali	10 kali		

MISI 3 : Mempercepat pembangunan infrastruktur publik

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	TARGET TAHUN					PROGRAM SKPD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4		5					6	7	
1	Meningkatnya infrastruktur penunjang kehidupan dan mobilitas masyarakat	1 Meningkatkan Pembangunan dan rehabilitasi jalan dan jembatan, jaringan irigasi dan konservasi sumber daya air, transportasi yang layak dan memadai. (Urusan Pekerjaan Umum)	1 Panjang jalan dalam kondisi baik (Km)	674,700	682,515	690,330	698,145	705,960	713,775	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	PU Bina Marga
			2 Proporsi Jembatan Dalam Keadaan Baik (%)	78	79	80	81	82	83	2	Program rehabilitasi/ pemeliharaan Jalan dan Jembatan	PU Bina Marga
			3 Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (Km)	473,008	478,936	484,863	490,790	496,718	502,645			
			4 Panjang jalan yg memiliki trotoar dan drainase (Km)	20	21	22.25	23	24	25			
			5 Panjang jalan kabupaten yg bisa dilalui kendaraan roda 4 (Km)	505,559	508,959	512,359	515,759	519,159	522,559			
			1 Panjang Jaringan Irigasi (Ha)	1.256	1.256	2.042	2.042	2.042	2.042	1	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	PU Pengairan
			2 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (Ha)	2.254	2.283	2.319	2.380	2.416	2.445			
			3 Rasio ketersediaan air baku untuk kebutuhan pokok sehari-hari (%)	65	68	70	71	73	75			
			4 Rasio ketersediaan air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang ada (%)	64	68	70	71	73	75			
			2 Meningkatkan kualitas permukiman (Urusan Perumahan)	1 Proporsi Rumah tangga dengan akses fasilitas sanitasi yang layak (%)	39%	39%	26%	42%	45%	50%	1	Program Lingkungan Sehat Perumahan
			2 Proporsi Rumah sehat (%)	54%	55%	56%	57%	58%	59%			
			3 cakupan lingkungan Permukiman sehat dan aman yang didukung dengan PSU (%)	46%	47%	48%	49%	50%	51%			
		3 Meningkatkan sarana dan prasarana transportasi (Urusan Perhubungan)	1 Jumlah Arus Penumpang (PnP)	467,382	514,120	565,532	622,085	684,294	752,723	1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Dishubkominfo
			Jumlah uji KIR angkutan Umum (Unit)	617	638	657	676	697	718			
			Jumlah Angkutan Jalan (AKAP & AKDP) (Unit)	231	231	231	231	231	231			
			Jumlah Terminal Angkutan Jalan (Buah)	3	3	4	5	6	9	2	Program peningkatan pelayanan angkutan	Dishubkominfo
			2 Jumlah Dermaga (buah)	5	5	5	6	8	10	3	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Dishubkominfo
			3 Jumlah Pelabuhan Laut (Buah)	2	2	2	3	3	4	4	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dishubkominfo
			4 Pemasangan Rambu - rambu Lalu Lintas Jalan (Unit)	90	96	140	190	240	290			
			5 Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten/kota	137	157	177	197	217	237	5	Program peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Dishubkominfo
			6 Tersedianya angkutan umum yang melayani jaringan trayek yang menghubungkan daerah tertinggal dan terpencil dengan wilayah yang telah tersedia jaringan jalan Kabupaten / Kota	113	140	175	210	245	280	6	Program Penataan dan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	Dishubkominfo
			7 Tersedianya halte pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	2	2	2	8	12	16	7	Program Pengadaan Fasilitas Operasional Kendaraan Bermotor	Dishubkominfo
			8 Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	3	3	3	4	5	8	8	Program Pembangunan/ Pengadaan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Dishubkominfo
										9	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Dishubkominfo

			9 Tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor bagi kabupaten/kota yang memiliki populasi kendaraan wajib uji minimal 4000 (empat ribu) kendaraan wajib uji	1	1	1	1	1	1	10 Program Peningkatan Operasional Retribusi Parkir Berlangganan	Dishubkominfo
			10 Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten/kota yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan pada kabupaten/kota pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	2	2	2	3	3	4		

MISI 4 : Meningkatkan Pembangunan dibidang ekonomi dengan prioritas sektor pertanian dan optimalisasi komoditas unggulan daerah yang berwawasan lingkungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	TARGET TAHUN					PROGRAM SKPD	SKPD PENANGGUNG
					2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4		5					6	7
1	Meningkatnya produksi dan produktifitas sector pertanian, perkebunan dan perikanan	1 Meningkatnya Pembangunan pertanian/peternakan (Urusan Pertanian)	1 Produksi tanaman pangan & Hortikultura A. Tanaman Pangan - Padi sawah dan padi ladang (Ton) - Jagung (Ton) - Ubi Kayu - Kedelai - Kacang Tanah B Buah-buahan (Ton) - Jeruk - Durian - Rambutan C Sayuran (Ton) - Bawang Merah - Cabe Rawit - Cabe Besar	148,663 95,338 37,029 621 2,002	150,150 96,291 37,399 627 2,022	151,651 97,254 37,773 633 2,042	153,168 98,227 38,151 640 2,063	154,699 99,209 38,533 646 2,083	156,246 100,201 38,918 653 2,104	1 peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2 pemberdayaan penyuluhan 3 peningkatan pemasaran hasil produksi	Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
		2 Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah serta Meningkatnya Kapasitas dan Peran serta Masyarakat (Ur Ketahanan Pangan)	1 Lumbung pangan desa 2 Jumlah Pertemuan Koordinasi, analisis dan perumusan kebijakan ketahanan pangan masyarakat 3 Meningkatnya partisipasi masyarakat/ kelompok tani pada program-program Ketahanan Pangan 4 Jumlah Masyarakat Yang memahami Teknologi Olahan bahan pangan lokal	6 lumbung 3 kali 10 20	6 lumbung 3 kali 20 30	6 lumbung 3 kali 30 40	6 lumbung 3 kali 40 50	6 lumbung 3 kali 50 60	6 lumbung 3 kali 60 70	1 peningkatan ketahanan pangan 2 Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	KKP KKP
		3 Meningkatnya Pembangunan kehutanan dan perkebunan (Ur Kehutanan)	1 Produktifitas Perkebunan dan Kehutanan. (Ton/Ha) / (M3) 2 Luas hutan rakyat yang direhabilitasi 3 Jumlah petani tembakau yang mendapat kan bantuan bagi petani tembakau 4 Produktifitas tembakau.	5.507/109,588 650 Ha 170 klmpk 431 (Kg/Ha)	6.869/49,846 685 Ha 700 klmpk 558 (Kg/Ha)	7.560/120,540 755 Ha 735 klmpk 600 (Kg/Ha)	8.320/125,030 800 Ha 770 klmpk 625 (Kg/Ha)	9.235/130,237 810 Ha 800 klmpk 660 (Kg/Ha)	10.345/140,654 820 Ha 840 klmpk 700 (Kg/Ha)	1 Pemanfaatan Potensi sumber daya hutan 2 Rehabilitasi hutan dan lahan 3 Peningkatan pemasaran hasil produksi perkebunan dan kesejahteraan petani	Dishutbun Dishutbun Dishutbun
		4 Meningkatnya Pembangunan perikanan (Ur Kelautan Perikanan)	1 Produktifitas hasil tangkapan laut (ton) 2 Produktifitas budidaya ikan laut (ton) 3 Produktifitas budidaya ikan air tawar (ton) 4 Tingkat konsumsi ikan/perkapita/ tahun (kg/tahun)	20,603.3 370.1 132.4 24.00	20,815.5 490.2 223.4 24.25	21,045.4 610.5 314.5 24.98	21,223.9 730.4 404.3 25.67	21,436.8 850.4 496.1 25.89	21,601.8 969.1 589.4 26.02	1 Pemberdayaan ekonomi masyarakat Pesisir 2 Pengembangan Budidaya Perikanan 3 Optimalisasi pengelolaan & pe-	Diskanla Diskanla Diskanla

		1 Luasan kawasan konservasi kawasan pesisir (Ha)	500.3	510.1	521	540	562	579.9	masaran produksi perikanan		
		2 Jumlah nelayan yang mendapatkan bantuan bagi nelayan (kelompok)	64	85	106	126	149	172	1 Peningkatan mitigasi bencana alam laut & perikanan iklim laut	Diskania	
									2 Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Diskania	
3	Menurunnya angka kemiskinan dan kesenjangan sosial	1 Berkurangnya Angka kemiskinan dan kesenjangan sosial wilayah (Ur. Sosial)	1 Jumlah Rumah Tangga miskin	220,000	200,000	180,000	160,000	150,000	140,000	1 Program Pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Dinsosnakertrans
			2 Jumlah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial)	10%	8%	6%	5%	4%	2%	2 Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Dinsosnakertrans
			3 Jumlah PMKS yang dibantu/ditangani	60	70	80	90	95	97		
4	Meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja melalui perluasan lapangan kerja	1 Meningkatnya kualitas kompetensi tenaga kerja serta penyediaan lapangan kerja (Ur. Tenaga kerja)	1 Angka pengangguran terbuka	2.89	2.7	2.5	2.4	2.3	2.2	1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas tenaga kerja	Dinsosnakertrans
			2 Angkatan kerja yang tidak bekerja	11,559	10,778	10,882	10.99	10.88	9.8		
			3 Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan	60.2	72.5	72.05	75.5	79.5	80.2		
			4 Jumlah Perusahaan yang membuat/membentuk sarana Hubungan Industrial (HI)	10%	70%	75%	80%	85%	88%	2 Program Perlindungan Pengembangan lembaga ketenagakerjaan	Dinsosnakertrans
			5 Jumlah Perusahaan yang menerapkan norma jamsostek	40%	45%	50%	55%	60%	65%		
			6 Jumlah tenaga kerja yang ikut Jamsostek	25%	30%	35%	40%	50%	55%		
			7 Jumlah Perusahaan yang menerapkan norma keselamatan dan kesehatan kerja (K3)	70%	80%	85%	90%	95%	98%		
			8 Angka Kecelakaan kerja	10%	8%	7%	5%	3%	1%		
7	Menjaga dan melestarikan lingkungan agar tetap asri, sehat, kondusif dalam rangka kelangsungan pembangunan	1 Meningkatnya daya dukung lingkungan terhadap pelaksanaan pembangunan	1 Pemenuhan baku mutu air	4	4	4	5	5	5	1 Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	BLH
			2 Pemenuhan baku mutu udara	0	2	2	3	3	3	1 Program Peningkatan Pengendalian polusi	BLH
			3 Meningkatnya kapasitas pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5%	10%	25%	35%	45%	55%	1 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	BLH
										2 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya alam	BLH
			4 Persentase perusahaan yang memiliki Dokumen HO, UKLIPL, AMDAL dan Ijin Lingkungan	80%	80%	82%	84%	86%	88%	1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	BLH

MISI 5 : Melakukan percepatan reformasi birokrasi di segala bidang, dan tata kelola pemerintahan yang baik (transparan dan akuntabel)

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	TARGET TAHUN					PROGRAM SKPD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4		5					6	7	
1	Meningkatnya transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif, Partisipatif, Inovatif dan memperhatikan keinginan masyarakat yang memadai didukung kajian secara memadai (Urusan Perencanaan Pemb)	1 Jumlah dokumen Perencanaan yang dihasilkan (RPJP,RPJM,RKPD,KUA-PPAS,Renstra dan Renja)	5 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	5 dokumen	1 Program perencanaan pembangunan daerah	Bappeda	
			2 Pemanfaatan dokumen perencanaan /penelitian yang dimanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			3 Penyusunan Perencanaan pembangunan jangka menengah, tahunan (RKPD) dan penyusunan KUA-PPAS tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu			
		2 Meningkatkan penataan kawasan daerah sesuai RTRW dan Peraturan Perundangan lainnya (Urusan Penataan Ruang)	1 Tersusunnya dokumen RBTU (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan)/Urban Design	-	-	-	ada	ada	ada	ada	1 Program Perencanaan Tata Ruang	PU Cikatarung
			2 Tersusunnya dokumen RTRW, RDTRK dan Peraturan Zonasi	ada / 1 dok	ada / 2 dok	ada / 3 dok	ada / 5 dok	ada / 7 dok	ada / 9 dok			
			1 Rasio Ruang Terbuka Hijau per satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB									
		2 Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	453	390	386	386	390	390				
		3 Terwujudnya sistem inovasi daerah (SIDa) bagi terciptanya daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat	1 Jumlah inovasi (produk, proses organisasi, perilaku, pasar) yang dihasilkan	-	1 inovasi	2 inovasi	3 inovasi	4 inovasi	5 inovasi	1 Program pengembangan data/informasi	Balitbangda	
			2 Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kebijakan	30%	32%	34%	36%	38%	40%			2 Program perencanaan pembangunan ekonomi
			3 Jumlah kajian terapan (action research) yang dilaksanakan	-	1 desa	2 desa	3 desa	4 desa	5 desa			
2	Meningkatnya layanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik	1 Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Profesional, bebas KKN (Urusan Kepegawalan)	1 Jumlah aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugasnya (dengan target 5 tahun sebanyak 1000 PNS ditingkatkan kualitas/kompetensinya)	550 orang	650 orang	750 orang	850 orang	900 orang	950 orang	1 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	BKD	
			2 Prosentase PNS yang mengikuti diklat kedinasan (Diklat Pimpinan)	59%	64%	67%	70%	75%	80%			2 Program Pendidikan Kedinasan
			3 Prosentase PNS yang mengikuti diklat fungsional	75%	80%	85%	87%	90%	93%	3 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD	
			4 Prosentase aparatur /pegawai yang mengikuti DiklatPim IV,III,II sesuai dengan jenjang kepangkatan.	59%	64%	67%	70%	75%	85%			
			5 Prosentase Jabatan struktural yang telah terisi	75%	75%	80%	100%	100%	100%			
			6 Jumlah kasus pelanggaran disiplin PNS	9 orang	7 orang	2 orang	1 orang	1 orang	1 orang			
		2 Meningkatnya peran serta lembaga legislatif dalam menyelenggarakan tugas	1 Jumlah perda yang ditindaklanjuti dalam APBD	22 perda	24 perda	24 perda	24 perda	26 perda	30 perda	1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Setwan	
			2 Jumlah Perda yang ditetapkan	23 perda	22 perda	20 perda	21 perda	21 perda	24 perda			

	keperintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat (Urusan Otonomi Daerah)	3	Jumlah Jaring asmara	63 kali	62 kali	61 kali	63 kali	64 kali	65 kali					
	3 Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien (Urusan Otonomi Daerah)	1	Prosentase penerapan e-gov.	-	-	-	-	-	-	1	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Bag. Org		
		2	Meningkatnya peringkat atas hasil evaluasi SAKIP.	C	C	CC	B	B	A	2	Program Peningkatan Profesionalism tenaga an pemeriksa dan aparatur pengawas	Bag. Org		
		3	Ketepatan waktu Penyusunan LKPJ, Lakip dan LPPD							3	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Bag. Org		
		4	Persentase SKPD yang telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menerapkan sesuai SK Bupati	0	40%	45%	60%	80%	90%					
		5	Prosentase SKPD yang sudah menyusun TAPKIN dengan tepat waktu baik dan benar	0	70%	100%	-	-	-					
		6	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Pelayanan Publik (SPP)	0 / 0	14 SPM / 0	14 SPM / 10%	14 SPM / 50%	14 SPM / 75%	14 SPM / 100%					
		7	Jumlah media komunikasi	46 unit + 1 rusak	47 unit	47 unit	54 unit	61 unit	68 unit			Bag. Humas & Protokol		
		8	Jumlah media informasi	23 buah	27 buah	27 buah	27 buah	29 buah	29 buah					
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	0	30%	30%	40%					
		10	Penyaluran Bantuan Beras Untuk Rakyat Miskin	86397 Rts	86397 Rts	86397 Rts	86397 Rts	86397 Rts	86397 Rts			Bag. Kesra		
		11	Jumlah rumah ibadah yang dibantu	Ponpes/ yayasan : 132 Masjid : 305 Musholla:1258	Ponpes/ yayasan : 157 Masjid : 271 Musholla:1031	Ponpes/ yayasan : 170 Masjid : 285 Musholla:1100	Ponpes/ yayasan : 175 Masjid : 290 Musholla:1130	Ponpes/ yayasan : 180 Masjid : 300 Musholla:1150	Ponpes/ yayasan : 185 Masjid : 310 Musholla:1180					
3	Terwujudnya pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel	1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah (Urusan OTODA)	2	Jumlah ADD (Alokasi Dana Dsa) yang disalurkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1	Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Bag. Adpum
		1	Opini audit BPK	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP					
		1	Jumlah Temuan APIP yang ditindak lanjut	95%	96%	97%	98%	99%	100%	1	peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Inspektorat		
		2	Jumlah Temuan BPK yang ditindak lanjut	95%	96%	97%	98%	99%	100%					
		1	Peningkatan PAD	81,876,726,485.53	123,545,229,169.85	125,125,996,935.85	126,377,256,905.21	127,641,029,474.26	128,917,439,469.00	1	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Dispenda		
		2	Rasio kemandirian PEMDA	9.67%	12.69%	11.97%	10.99%	10.10%	9.26%					
		3	Ratio PAD terhadap Total pendapatan	6.82%	8.48%	8.50%	8.50%	8.50%	8.50%					
		4	Ratio PAD terhadap APBD (total belanja	7.01%	8.92%	6.94%	5.84%	4.91%	4.14%					
		5	Ratio Belanja Modal terhadap total APBD	16%	26%	29%	32%	35%	38%			BPKA		
4	Terwujudnya masyarakat madani, kondusif dan berbasis religius toleran dan bertanggung jawab	1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat, serta Penegakan Supremasi Hukum yang Berkeadilan,	1	Jumlah penyuluhan pencegahan penyakit masyarakat	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	1	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Satpol PP
		2	Jumlah Angka Kriminal	7 macam	7 macam	6 macam	5 macam	4 macam	5 macam					
		3	Persentase penegakan peraturan	30%	40%	50%	60%	70%	80%	2	Program pemeliharaan	Satpol PP		

		Transparan, dan Profesional. (urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri)	daerah (Jumlah pelanggaran masyarakat terhadap Perda)								kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	
			4 Jumlah satpol PP	PNS : 71 org THL:250 Org	PNS : 70 org THL:240 Org	PNS : 70 org THL:225 Org	PNS : 68 org THL:225 Org	PNS : 66 org THL:225 Org	PNS : 66 org THL:225 Org			
			1 Jumlah kegiatan forum komunikasi antar umat beragama	2 kali	2 kali	3 kali	4 kali	4 kali	4 kali		1 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Bakesbangpol
			1 Jumlah sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan	2 kali	6 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali		1 Program pendidikan politik masyarakat	Bakesbangpol
			2 Jumlah kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan melalui apresiasi lagu-lagu nasional/	2 kali	6 kali	6 kali	7 kali	8 kali	9 kali			
			3 negara dan lambang negara seminar talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali			
5	Meningkatnya kewaspadaan dan upaya penanggulangan bencana	1 Meningkatnya upaya penanggulangan bencana secara efektif dan efisien	1 Masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana	-	19 orang	27 orang	35 orang	43 orang	51 orang		1 Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	BPBD
			2 Regulasi penanggulangan dan penanganan bencana	-	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda	1 Perda			
6	Mengembangkan potensi dan bakat pemuda di bidang Olah raga seni dan budaya	1 Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah (Urusan Kebudayaan & Urusan Kepemudaan & Olahraga)	1 Jumlah pemuda berprestasi pada berbagai bidang di tingkat nasional	13	13	25	25	30	30		1 Program peningkatan peran serta kepemudaan	Disporabud
			2 Jumlah cabang olah raga yang berprestasi	70%	80%	80%	90%	90%	95%		2 Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Disporabud
			3 Jumlah sarana dan prasarana yang meningkat kualitasnya (%)	250	250	250	500	500	500		3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Disporabud
			4 Peningkatan dan pemasarakatan Olah Raga (jumlah group olah raga)	260	265	265	265	265	275		4 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Disporabud
			5 Jumlah kegiatan fasilitasi dan pengembangan kelompok seni termasuk kelompok seni wanita	165	168	168	168	168	168			
			6 Jumlah warisan tradisi yang terawat	7	9	9	9	12	12			
7	Memberdayakan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah	1 Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah (Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa)	1 Jumlah usaha ekonomi masyarakat pedesaan yang berkembang								1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat perdesaan	Bapemas Perdes
			a. UPPKS	-	-	-	-	-	-			
			b. UED-SP	-	-	-	5 desa	10 desa	10 desa		2 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Bapemas Perdes
			c.P3EL				10 desa	13 desa	13 desa			
			d.BUMDES				13 desa	15 desa	20 desa			
			2 Rumah tidak layak huni yang dibangun secara swadaya dan swakarsa	2%	5%	7%	10%	12%	15%			
			3 Jumlah dana Swadaya masyarakat masyarakat dalam pembangunan	-	-	-	-	-	-			
			4 Cakupan jaringan listrik perdesaan	82%	83%	83,1%	83,4%	83,6%	83,8%			

MISI 6 : Meningkatkan kemudahan pelayanan publik yang cepat, sederhana serta murah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2013	TARGET TAHUN					PROGRAM SKPD	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
					2014	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4		5					6	7	
1	Mewujudkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik melalui media informasi dan komunikasi yang baik menuju masyarakat yang bertanggungjawab berbasis iman dan taqwa	2 Meningkatkan tertib administrasi kependudukan dan meningkatnya kualitas layanan kependudukan (Urusan Dukcapil)	1 Prosentase jumlah penduduk	90%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	1 Penataan administrasi kependudukan	Dispendukcapil
			2 Prosentase jumlah keluarga yang ber-KK	90%	95%	100%	100%	100%	100%			
			3 Prosentase jumlah penduduk yang ber-Akta Kelahiran	90%	95%	100%	100%	100%	100%			
			4 Jumlah Pelayanan Akte Pencatatan Sipil	90%	95%	100%	100%	100%	100%			
		4 Meningkatkan Penyelesaian Ijin Lokasi tepat waktu (Urusan OTDA, Pemerintahan umum, Adm. Keuangan)	1 Jumlah ijin lokasi (kawasan luasan tanah pada suatu lokasi)	107	141	139	150	170	200	1 Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	KPPT	
			2 Prosentase penerbitan ijin tepat waktu usaha dan ijin usaha lainnya secara tepat waktu	70%	75%	80%	100%	100%	100%			
		5 Meningkatkan sistem komunikasi informasi dan media massa. (urusan komunikasi dan informatika)	1 Jumlah tower komunikasi	160	177	177	190	200	200	1 Program kerjasama informasi dan media massa	Dishubkominfo	
			2 pelaksanaan diseminasi dan pendistribusian informasi nasional melalui media massa seperti majalah, radio dan televisi	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
			3 Media baru seperti website (media online)	1 domain (11 Subdomain)	1 domain (37 Subdomain)	1 domain (37 Subdomain)	1 domain (45 Subdomain)	1 domain (58 Subdomain)	1 domain (58 Subdomain)	3 Program optimnalisasi pemanfaatan tekhnologi informasi	Dishubkominfo	
			4 Media luar ruang seperti media buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk dan baliho	35 Unit	42 Unit	42 Unit	55 Unit	60 Unit	65 Unit			
			5 Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat ditingkat kecamatan	50%	100%	100%	100%	100%	100%	4 Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa	Dishubkominfo	
			6 Teraksananya PPID	100%	100%	100%	100%	100%	100%	5 Program kerjasama informasi dan media massa	Dishubkominfo	
								6 Program pengembangan pos telekomunikasi dan informatika	Dishubkominfo			
								7 Program penyusunan sistem	Dishubkominfo			
								8 Program pembangunan jaringan komunikasi dan prasarana komunikasi dan informatika	Dishubkominfo			
								9 Program pembangunan/ pengadaan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika	Dishubkominfo			

